

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Literature Review*

Pertama, Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia oleh Martien Herna Susanti⁷. Jurnal ini membahas mengenai dinasti politik yang marak terjadi di Indonesia dalam kontestasi Pilkada. Dinasti politik yang dieksekusi merupakan ruang perebutan dan pertahanan kekuasaan di level regional dan nasional, sehingga dalam aktualisasinya tidak lepas dari peran partai politik dan regulasi mengenai Pilkada. Oligarki dan relasi keluarga dibadan partai politik sebagai sebuah organisasi dan jembatan politik masyarakat, memiliki kecenderungan konsistensi terhadap kekuasaan, terutama pada pencalonan kandidat atau kontestan oleh partai politik yang berdasarkan keinginan elit partai melalui mekanisme demokratis, dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon. Hasil dari jurnal ini adalah: praktik politik dinasti akan berdampak pada pelemahan check and balances serta pada praktik KKN; dan regulasi yang lemah dalam memangkas politik dinasti. Sejatinya, demokrasi yang seharusnya dipelihara oleh negara adaah menuntut konsolidasi demokrasi yang mendukung kedaulatan masyarakat, akan tetapi praktik politik dinasti justru menjadi celah degradasi demokrasi itu sendiri, sehingga nilai-nilai politik dan demokrasi kemurniannya pudar.

⁷ Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia," *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (2017): 111–19.

Kedua, Analisis Proses Kaderisasi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Garut oleh Miman Nurdiaman dkk⁸. Penelitian ini memiliki variabel yang sama dengan penulis, akan tetapi untuk fokus dan lokus terdapat perbedaan. Penelitian terhadap variabel PDIP ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan sistem kaderisasi yang dibangun oleh PDIP di Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dan secara intensif studi kasusnya fokus kepada PDIP, dan menguraikan bagaimana proses kaderisasi PDIP tersebut melalui prosedur pengumpulan data, antara lain : tahap observasi lokasi penelitian; wawancara mendalam; dan studi dokumentasi. Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : Partai Politik, yang salah satu fungsinya ialah melakukan kaderisasi politik; dan Pendidikan Politik. Hasil penelitian ini menguraikan bahwa dalam proses dan sistem kaderisasi yang digunakan oleh PDIP melalui beberapa jenjang, yaitu: Jenjang Pratama; Jenjang Madya; dan Jenjang Utama.

Dalam upaya peningkatan kapabilitas kader sebagai SDM di internal partai dan pengembangan potensi kader, maka kader wajib melalui tingkatan kaderisasi, yaitu : Kaderisasi Kader Pratama; Kaderisasi Kader Madya; dan Kaderisasi Kader Utama. Tentu dalam proses kaderisasi ini, PDIP Kabupaten Garut mengalami hambatan-hambatan, yaitu dalam waktu dan sumber daya manusia. Perpacuan waktu dalam proses kaderisasi kurang maksimal, sehingga berdampak kepada kedisiplinan calon kader PDIP di Garut. Sumber daya manusia adalah faktor penting untuk pengembangan kaderisasi dalam partai politik, dan penghambat

⁸ Nurdiaman et al., “Analisis Proses Kaderisasi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Garut.”

dalam proses kaderisasi ini adalah hambatan pada peserta dan pelaksana kegiatan kaderisasi, yaitu : masih adanya kejenuhan terhadap materi dan pengembelangan kader; kapasitas peserta yang belum maksimal dalam proses kaderisasi sehingga perlu adanya evaluasi hasil kaderisasi yang telah dilaksanakan. Tentunya dua hal tersebut menjadi prioritas bagi pengurus struktural PDIP di Kabupaten Garut dalam mengemban amanah pusat untuk mencetak kader-kader yang militan dan progresif.

Ketiga, Strategi dan Modal Politik Sri Rahmi dalam Pileg 2004-2019 di Sulawesi Selatan, oleh Bias Fajar Lagabuana dan dkk⁹. Penelitian ini fokus terhadap bagaimana strategi dan modal politik seorang aktor atau elit lokal dalam mempertahankan posisinya pada Pileg di Sulsel. Kajian terhadap pertahanan kekuasaan dalam politik di Indonesia terdapa khususnya pada praktik politik dinasti. Akan tetapi, pada penelitian ini terdapat penemuan hasil penelitian bahwa bertahannya kekuasaan tidak selalu bersumber dari kekuatan dinasti, dan studi kasus terhadap Sri Rahmi adalah bertahanan kekuasaan lokal yang dominan di Sulsel. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan medeskripsikan bbagaimana pertahanan kekuasaan yang digunakan oleh Sri Rahmi sehngga terpilih menjadi anggpta legistaltif selama empat periode paralel. Metode penliitian yang dgunakan adalah deskriptif analisis, yang digunakan untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang ditemukan di lapangan dan hasil dari wawancara maupun pengamatan yang terjadi dilapangan. Terdapat beberap faktor yang mendukung pertahanan kekuasaan Sri Rahmi melalui strategi politik yang

⁹ Bias Fajar Lagabuana, Sukri Sukri, and Haryanto Haryanto, "Bertahan Dan Menang: Strategi Dan Modal Politik Sri Rahmi Dalam Pemilihan Legislatif 2004-2019 Di Sulawesi Selatan," *Jurnal Transformativ* 7, no. 2 (2021): 157–73, <https://doi.org/10.21776/ub.transformativ.2021.007.02.1>.

digunakannya, yaitu : kekuatan *personality*, *social network*, dan partai politik yang mendukungnya.

Keempat, Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional oleh Insan Harapan Harahap¹⁰. Artikel ini berfokus

pada rekrutmen dan mekanisme kaderisasi partai politik yang kemudian berpengaruh terhadap kepemimpinan nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi kaderisasi partai politik akan berpengaruh terhadap kualitas kader itu sendiri, sehingga sikap kepemimpinan kader juga merupakan keharusan dalam menyelesaikan persoalan yang ada di tubuh partai politik. Karena pada era demokrasi kontemporer saat ini, partai politik menjadi salah satu pilar yang penting untuk kepemimpinan nasional dimasa depan. Namun pada kondisi yang nyata di lapangan, mayoritas partai berdiri belum mampu memaksimalkan kaderisasi yang tegak lurus, sehingga masih ada pengaruh pada politik kekerabatan. Temuan lainnya adalah, kegagalan kaderisasi yang ada di internal partai juga diakibatkan oleh dukungan partai pada kalangan artis, yang menganggap bahwa kalangan artis dapat menarik simpatisan dan perolehan suara secara maksimal untuk partai, disisi lain mengesampingkan kader potensial, khususnya pada kontestasi politik lokal, karena partai terlena dengan faktor popularitas, sehingga mengabaikan makna dan azas partai itu sendiri sebagai doktrin kepada kader yang potensial untuk meraih suara masyarakat. Akibatnya yang terjadi, banyak kader yang menjadi pemimpin nasional tidak mampu bertanggung jawab dan menggondong tugas negara dengan baik, sehingga menyalahgunakan kepentingannya untuk pribadi dan kerabatnya.

¹⁰ Insan Harapan Harahap, "KADERISASI PARTAI POLITIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPEMIMPINAN NASIONAL," n.d., <https://repository.bakrie.ac.id/1246/1/01>. Kaderisasi Parpol dan Pengaruhnya thd Kepemimpinan Nasional %28Jurnal Politik LIPI%29.pdf.

Kelima, Peran Aktor dalam Proses Pembentukan Dinasti Politik (Studi Kasus di Kabupaten Purwakarta oleh Dea Arsyad Mujtahid Shibghotulloh, dkk. Penelitian ini memuat mengenai bagaimana kekuasaan politik yang dihegemoni oleh elit politik yang kemudian menjadikan anggota keluarganya sebagai bagian dari dinasti politik, yang hingga saat inipun masih menjadi satu permasalahan krusial dalam demokratisasi Indonesia. Masyarakat di Indonesia tergerus peluangnya, yang diakibatkan dari kekuasaan elit lokal. Pohon kekuasaan Dedi Mulyadi sebagai aktor politik, dengan memberikan jalan mulus kepada istrinya, Anne Ratna, sebagai Bupati Purwakarta, memberikan cerminan kekuasaan yang mulus, ditambah lagi anaknya Maula Akbar diposisikan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kab. Purwakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif yang menggunakan studi pada Kab. Purwakarta, kemudian menggambarkan bagaimana dinasti politik yang terbentuk oleh aktor politik melalui kemampuannya yang berbasis pada pengetahuan, instrumennya melalui partai politik, birokrasi dan budayawan Sunda. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dinasti politik yang terbentuk di Purwakarta oleh Dedi sebagai aktor politik memiliki peran yang sangat besar, sehingga melalui kemampuan berpolitiknya yang berbasis pada instrumen yang telah disebutkan sebelumnya, memiliki kepentingan yang jangka panjang untuk kekuasaan yang lama dan lebih tinggi.

2.2 Teori dan Konsep

2.2.1 Politik Dinasti

Politik dinasti adalah tantangan bagi suatu negara dan elemen politik, sehingga berimplikasi pada pemerintahan yang kurang memiliki integritas dan kualitas. Citra politik yang kuat, dibangun oleh elit lokal, yang memiliki basis massa yang besar dan pengaruh penting, sehingga ada upaya dan ambisi untuk mempertahankan citra politik tersebut hingga mengakar ke keluarga. Citra politik yang dipertahankan tersebut melalui relasi *family*, terkadang menggunakan cara-cara yang tidak baik, dan ada kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan serta praktik KKN. Dalam UU Pemilu, memang tidak mengatur secara mengikat soal dampak dan praktik politik dinasti, akan tetapi banyak ahli yang menganggap bahwa politik dinasti terbentuk dari ruang demokrasi yang amat terbuka di Indonesia dan desentralisasi lokal. Qaerubin menjelaskan bahwa politik dinasti adalah kekuasaan politik formal yang dipegang oleh keluarga, dan relasi keluarga tersebut dalam *power* tersebut¹¹.

Politik kekerabatan atau juga dapat disebut sebagai politik dinasti, menurut Ernesto, politik dinasti terjadi ketika seorang politisi memiliki hubungan keluarga dengan politisi sebelumnya. Terdapat beberapa dimensi politik dinasti, yaitu¹² :

1. Dimensi waktu, bahwa keluarga dari pejabat politik sebelumnya minimal berpengalaman 2 periode kekuasaan.

¹¹ Agus Dedi, "Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi," *Jurnal MODERAT* 8, no. 1 (2022): 92–101.

¹² Titin Purwaningsih, "Jurnal Politik Politik Kekerabatan Dan Kualitas Kandidat Di Sulawesi Selatan Politik Kekerabatan Dan Kualitas Kandidat Di Sulawesi Selatan 1" 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.10>.

2. Dimensi jumlah, bahwa terdapat 2 orang atau lebih.
3. Dimensi jabatan politik, pada jabatan yang sama atau berbeda.
4. Dimensi kekuasaan, dari sisi mempertahankan dan memperbesar kekuasaan.

Perspektif lain mengenai politik dinasti dikemukakan oleh Mosca, bahwa terjadinya politik dinasti dipengaruhi oleh gerakan elit politik yang memiliki inisiasi politik besar untuk mewariskan kekuasaannya kepada generasi penerus, sehingga proses ini terjadi pada kondisi politik dan demokrasi yang terbuka¹³. Dalam penelitian ini, politik dinasti yang dibangun oleh Dedi Mulyadi di Purwakarta memang sangat terlihat. Eksistensi Dedi Mulyadi sebagai kepala daerah 2 periode (2008-2013 dan 2013-2018), kemudian dilanjutkan oleh istrinya yaitu Anne Ratna (Pilkada 2018), adalah sebuah cerminan politik dinasti untuk kepentingan kekuasaan politik. Disisi lain yang begitu menguat, adalah Dedi Mulyadi sebagai kader Partai Golkar, menempatkan anaknya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Purwakarta. Maka, konsep ini cukup relevan untuk bisa menguraikan bagaimana politik dinasti Dedi Mulyadi di Kabupaten Purwakarta, maupun pengaruh dan dukungan dari masyarakat dan lingkungan internal-eksternal Partai Golkar, mengingat Partai Golkar ini sangat mendominasi dalam membangun politik dinasti tingkat lokal.

Politik kekerabatan sering juga disebut politik dinasti, meski sampai sekarang tidak ada definisi yang seragam. Menurut Ernesto Dal Bo (2006), politik dinasti terjadi apabila seorang politisi mempunyai hubungan keluarga dengan

¹³ Gun-Gun Heryanto, *Literasi Politik : Dinamika Konsolidasi Demokrasi Pasca Reformasi* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). Hal. 210.

politisi sebelumnya. Hal ini senada dengan pengertian dari Pablo Querobin (2011) yang menyatakan bahwa politik dinasti merupakan bentuk khusus dari upaya elite untuk mempertahankan kekuasaan yang mana satu atau beberapa kelompok keluarga memonopoli kekuasaan politik. Menurut Yasushi Asako (2012), politik dinasti terjadi apabila satu anggota keluarga menduduki jabatan politik yang sebelumnya dijabat oleh kerabatnya. Menurut Stephen Hess (dalam Kurtz II 1989), “political dynasty as any family that has had at least four members, in the same name, elected to federal office” (dinasti politik terjadi apabila terdapat empat atau lebih anggota keluarga dalam satu garis keturunan menduduki jabatan politik). Menurut Casey (2009 : 94-95), “political kinship or political family membership is defined as either a tie of affinity or a consanguineous connection within two generations from the candidate”. (Kekerabatan politik ataupun keluarga politik terjadi apabila terdapat hubungan darah ataupun perkawinan dalam dua generasi kandidat pejabat politik).

Dari berbagai pengertian tersebut, terdapat beberapa dimensi politik dari dinasti ataupun politik kekerabatan yaitu dimensi waktu (keluarga dari pejabat politik sebelumnya, minimal 2 periode kekuasaan), dimensi jumlah (2 orang atau lebih menurut Pablo, Asako dan Dal Bo; 4 orang menurut Hess dan 2 generasi menurut Casey), dimensi jabatan politik (jabatan politik yang sama ataupun berbeda), dan dimensi kekuasaan (mempertahankan atau memperbesar kekuasaan). Dilihat dari dimensi jumlah, penulis lebih sepatutnya dengan Pablo, Asako maupun Dal Bo bahwa politik dinasti atau politik kekerabatan apabila terdapat dua orang atau lebih dalam satu keluarga yang menduduki jabatan politik.

Dari kedua orang anggota keluarga tersebut, kecenderungan terjadi politik kekerabatan terjadi pada orang kedua. Jumlah dua orang ini konsisten dengan dimensi waktu, dua periode kekuasaan. Namun demikian, menurut penulis, terdapat satu dimensi penting yang belum dimasukkan dalam pengertian politik kekerabatan. ataupun politik dinasti yaitu dimensi rekrutmen politik yang terdiri dari proses rekrutmen yang demokratis dan kualitas kandidat dalam rekrutmen politik tersebut.

Politik kekerabatan terjadi apabila rekrutmen politik berdasarkan kepada pertimbangan hubungan kekerabatan dan tidak berdasarkan pada aspek kualifikasi kandidat. Dari berbagai dimensi tersebut, maka politik kekerabatan dalam penelitian ini adalah rekrutmen politik yang menghasilkan anggota keluarga yang menduduki jabatan politik/pemerintahan yang tidak didasarkan atas kemampuan yang dimilikinya ataupun tidak melalui prosedur yang telah digariskan, namun lebih didasarkan atas pertimbangan hubungan kekerabatannya (baik karena keturunan ataupun ikatan perkawinan).

Untuk membedakan anggota keluarga politik yang memperoleh jabatan politik sebagai manifestasi politik kekerabatan dan bukan politik kekerabatan, dilakukan dengan menganalisis dua aspek yaitu prosedur dalam rekrutmen politik dan kualitas kandidat. Dari prosedur rekrutmen politik dan kualitas kandidat, pemilahan politik kekerabatan dapat dilihat dari 4 (empat) kuadran, seperti dalam bagan berikut :



Bagan 1 tersebut menunjukkan bahwa dilihat dari prosedur rekrutmen politik dan kualitas kandidat, terdapat 4 (empat) kuadran, yaitu kuadran I (prosedural-berkualitas), kuadran II (prosedural-non kualitas), kuadran III (non prosedural-non kualitas) dan kuadran IV (non prosedural-berkualitas). Dilihat dari 4 (empat) kuadran tersebut, kuadran I adalah anggota keluarga politik yang memperoleh jabatan politik melalui prosedur rekrutmen yang ditetapkan dan mempunyai kualitas yang dibutuhkan dalam proses rekrutmen politik. Pada kuadran I ini bukan merupakan manifestasi dari politik kekerabatan, meskipun berasal dari keluarga politik. Kuadran II, III dan IV merupakan manifestasi dari politik kekerabatan karena tidak memenuhi salah satu ataupun kedua unsur, yaitu rekrutmen yang berdasar prosedur yang digariskan dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dalam rekrutmen politik. Dari dua unsur tersebut, artikel ini menitikberatkan pada aspek kualitas kandidat.

Norris (1997) membagi analisis rekrutmen politik dalam empat level analisis yaitu: 1) analisis pada level sistem politik yang terdiri dari sistem hukum, sistem pemilu dan sistem kepartaian; 2) proses rekrutmen yang menganalisis demokrasi internal partai; 3) analisis terhadap para kandidat; dan 4) level analisis pada selektor. Dalam konteks politik kekerabatan, analisis dalam artikel ini menitikberatkan pada analisis terhadap kandidat yang berasal dari keluarga politik.

Variabel internal kandidat dalam rekrutmen politik menitikberatkan pada modal yang dimiliki kandidat dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam proses rekrutmen. Norris dan Lovenduski (1993) menyatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi masuknya anggota kekerabatan ke dalam politik yaitu motivasi dan modal politik. Menurut Prewitt (dalam Kurtz II 1989), keluarga politik terjadi karena dua hal yaitu adanya pewarisan ketertarikan politik dari orang tua kepada anaknya dan seorang anak meneruskan pekerjaan yang dilakukan oleh ayahnya. Aspek sosialisasi yang dilakukan oleh orang tua menjadi salah satu faktor munculnya politik kekerabatan. Selain itu, kandidat dari keluarga politik biasanya mempunyai modal politik yang memadai yang terdiri dari jaringan politik, pendidikan, pengalaman, dan sumber daya keuangan.

Almond dan Verba (1989: 269-270) menyatakan bahwa sosialisasi politik dan pengalaman politik bersifat kumulatif mempengaruhi kemampuan politik seseorang. Prewitt (dalam Liefferinge dan Steyvers 2009) mengkaji secara lebih spesifik teori Almond dan Verba dalam konteks keluarga politik. Menurutnya :

“...This over-exposure or strong political socialization is considered to be a very important self-recruiting mechanism among future politicians, whereas social background characteristics, functional demands or personality traits are important selection criteria.”

Prewitt menyatakan bahwa dalam keluarga politik terjadi sosialisasi politik yang kuat sehingga kandidat dari politik kekerabatan mempunyai aspek personal yang dibutuhkan dalam kriteria seleksi. Prewitt tidak menyebutkan secara spesifik yang dimaksudkan dengan aspek personal dalam kriteria seleksi tersebut, namun Martinez (2010) dalam penelitiannya di Amerika Serikat menyebutkan bahwa sosialisasi politik dalam keluarga menentukan tingkat aktivisme politik, identifikasi partai, pengetahuan dan ketrampilan politiknya.

“The family, according to theories of childhood socialization, affects the acquisition of participant values; these values then determine subsequent levels of political activism, party identification, political knowledge, and sense of political efficacy. Exposure in the home to political talk and activism is thus linked to future political behaviour.”

Dengan kata lain bahwa sosialisasi politik dalam keluarga menentukan kualitas yang dimiliki kandidat dalam rekrutmen politik. Kualitas kandidat ini merupakan aspek utama dari variabel internal kandidat yang dianalisis dalam penelitian ini. Dalam kasus Indonesia, masalah kualitas kandidat yang berasal dari politik kekerabatan masih diperdebatkan dan sebagian menganggap bahwa kandidat dari politik kekerabatan mengandalkan popularitas keluarga semata.

Analisis terhadap variabel internal kandidat dalam penelitian ini menyangkut legacy politik yang dimiliki, baik legacy politik maupun sosial yang akan mempengaruhi kualitas kandidat yang berasal dari keluarga politik. Kualitas kandidat adalah karakteristik yang dimiliki oleh kandidat yang memungkinkan baginya untuk dipilih dalam jabatan politik dan menunjukkan kapabilitasnya sebagai seorang politisi (Jacobson dan Kernell 1983), namun demikian belum ada indikator yang baku untuk mengukur kualitas kandidat. Kualitas ataupun kompetensi politik, menurut Almond dan Verba, dipengaruhi oleh partisipasi ataupun pengalaman politik sebelumnya, antara lain partisipasi dalam keluarga, sekolah maupun pekerjaan. Lebih lanjut Almond dan Verba (1989: 301) menyatakan bahwa pengaruh partisipasi dalam keluarga, sekolah dan pekerjaan terhadap kompetensi bersifat kumulatif. Semakin aktif dalam politik, semakin baik kompetensinya. Menurut Jacobson dan Kernell (1983), kualitas kandidat diukur dari pengalaman politik sebelumnya.

Dari berbagai pendapat tersebut maka kualitas kandidat dalam artikel ini meliputi tiga variabel yaitu pendidikan, pelatihan dan pengalaman politik yang dimiliki oleh kandidat. Pengalaman politik dalam penelitian ini dilihat dari tiga aspek, yaitu aktivitasnya dalam partai politik, pengalaman dalam organisasi, dan pengalaman dalam pekerjaan sebelumnya. Analisis tentang kualitas kandidat tersebut digunakan untuk menganalisis lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya politik kekerabatan di Sulawesi Selatan yang mengacu kepada teori sosialisasi dari Almond dan Verba serta Prewitt dan Martinez.

2.2.2 Kaderisasi Partai Politik

Partai politik menurut Sailer adalah sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk mobilisasi massa melalui individu individu dalam suatu aksi nyata dan kolektivitas untuk melawan kelompok lain atau melakukan gerakan koalisi dengan pihak yang tengah memiliki posisi strategis dalam pemerintahan¹⁴. Gerakan-gerakan kolektivitas tersebut perlu memperoleh justifikasi bahwa aktivitas merupakan kepentingan bersama. Partai politik juga dapat diuraikan sebagai suatu kumpulan individu-individu yang secara terstruktur terbentuk sebagai sebuah lembaga yang bertujuan untuk merebut kekuasaan politik secara bersama dan institusional lisensinya Melalui penggunaan hak suara yang berjalan secara teratur. Melalui kekuasaan yang telah diraih orang-orang yang terhimpun dalam partai politik menjalankan program dan visi misi partai politik. Sama halnya sebagai suatu organisasi partai politik juga memiliki asas, tujuan, ideologi yang diterjemahkan ke dalam program-program tertentu¹⁵. Menurut Budiardjo, salah satu fungsi dari partai politik ialah sarana rekrutmen politik atau sarana kaderisasi politik yang digunakan oleh partai untuk membentuk suatu kader dan pemimpin politik di masa depan. Fungsi rekrutmen dan kaderisasi politik sebagai sebuah kepentingan internal partai untuk mencetak kader-kader yang berkualitas dan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri dan memiliki peluang untuk mengajukan sebagai calon kepala daerah atau masuk ke dalam bursa kepemimpinan nasional¹⁶.

¹⁴ Firmanzah, *Marketing Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007). Hal 65.

¹⁵ Arif Sugiono, *Strategic Political Marketing* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, n.d.). Hal. 33.

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015). Hal. 408.

Kepemimpinan dan kaderisasi merupakan hal yang sangat berkaitan dalam pengembangan suatu organisasi khususnya dalam partai politik. Kaderisasi sebagai suatu upaya untuk mendukung terbentuknya integritas dan kepribadian serta kemampuan kader untuk menggerakkan orang lain secara masif sehingga dapat mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa depan dan fungsi dari kaderisasi ini sendiri juga dapat dipersiapkan untuk mencetak calon-calon yang siap untuk memimpin negara dan perjuangan sebuah organisasi. Rekrutmen dan kaderisasi merupakan hal yang sangat erat untuk berproses dan mencetak kader pemimpin. Menurut Tead, kaderisasi kepemimpinan merupakan proses yang dipersiapkan oleh organisasi atau dalam konteks ini adalah partai politik untuk mencetak kader baru di masa depan sebagai pemikul tanggung jawab dan kepentingan besar internal organisasi¹⁷. Maka dari itu proses kaderisasi setiap partai politik tentu memiliki perbedaan dalam teknis penyelenggaraan dan doktrin partai tersebut kepada kadernya.

Cholisin berpendapat bahwa proses rekrutmen dan kaderisasi politik dalam partai merupakan sebuah proses pengangkatan seseorang dan kelompok melalui seleksi, untuk melaksanakan peran-peran kader tersebut dalam sistem politik dan pemerintahan¹⁸. Proses kaderisasi melalui dua sistem kaderisasi yang dapat ditempuh, yaitu¹⁹ : kaderisasi formal dan kaderisasi informal. *Kaderisasi Informal*, dilakukan melalui proses kehidupan sehari-hari dalam lingkungan dan kehidupan masyarakat, sehingga keunggulannya terlihat dan mampu bersaing dalam setiap aspek. Kelebihan tersebut sebagai kapabilitas dan kapasitas yang

¹⁷ Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1994). Hal. 51.

¹⁸ Cholisin, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Yogyakarta: UNY Press, 2007). Hal. 113.

¹⁹ Rivai, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007). Hal. 87.

dimiliki oleh kader dan indikatornya adalah : kepribadian positif, gigih, memiliki loyalitas, mempunyai dedikasi yang besar kepada organisasi. *Kaderisasi Formal*, adalah sistem kaderisasi yang dilakukan secara sistematis, terlembaga dan terarah sesuai dengan peraturan yang berlaku di AD/ART. Dalam konteks sistem kaderisasi yang dibangun oleh Partai Golkar Kabupaten Purwakarta, hal ini menarik untuk diteliti bagaimana proses dan sistem kaderisasi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2018, yang dirancang dan dipersiapkan oleh Golongan Karya, mengingat kader Golkar yang maju dan menang dalam kontestasi Pilkada.



2.3 Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran, dimulai dari Partai Golkar menjalankan fungsi kaderisasi politik. Lokus Kabupaten Purwakarta dengan pertimbangan *case* masalah adanya politik dinasti yang telah dibangun oleh elit Golkar, dan sebagai jalan halus untuk capaian melanggengkan kekuasaan, melalui kendaraan politik Golkar, dan kaderisasi untuk Pilkada 2018. Hasil penelitian ini akan menguraikan beberapa temuan : terbangunnya politik dinasti di Kab. Purwakarta; relasi politik dinasti dan sistem kaderisasi politik Partai Golkar, dan faktor maupun dampak politik dinasti di Kab. Purwakarta.

